KONTRADIKSI KEWENANGAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT DAN PENYIDIK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

OLEH:

LUHUT SIMBOLON

2240057026

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi fakultas hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan pancasila

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembang zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika, serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
3. Mengembangan pengetahuan umum yang berwawasan nasional dan iinternasional
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktsi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Luhut Simbolon
NIM	: 2240057026
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penuntut dan Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer"** adalah:

1) Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kulah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelas sarjana hokum di unversitas lan, kecuali pada bagian-bagiian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jakarta, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan

Luhut Simbolon

NIM 2240057026

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penuntut dan Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Oleh:

Nama	: Luhut Simbolon
Nim	: 2240057026
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2025

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Hendri Jayadi , S.H., M.H)	(Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H)
NIDN 0302117904	NIDK 8804630017

Ketua Program Studi Hukum	Dekan
(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)	(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H)
NIDN 0327046303	NIDN 0302117904

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 Januari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Luhut Simbolon
NIM	: 2240057026
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penuntut Dan Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer".**

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Armunanto, S.E., S.H., M.H	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penuntut dan Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama	: Luhut Simbolon
NIM	: 2240057026
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal 31 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Hendri Jayadi , S.H., M.H)	(Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H)
NIDN 0302117904	NIDK 8804630017

Anggota Tim Penguji

(Dr. Armunanto, S.E., S.H., M.H)

NIDK 8986240022

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Luhut Simbolon
NIM	: 2240057026
Fakultas	: Fakultas Hukum
Program Studi	: Hukum
Jenis Tugas Akhir	: SKripsi
Judul	:

Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penuntut dan Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasii karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan seabgai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak CIpta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademi yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025
Yang menyatakan,

LUHUT SIMBOLON

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur patut disampakan kehadrat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya yang tak terhingga sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai tepat waktu, walaupun disana sini masih terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih kepada berbagai phak yang membantu, memberi dukungan, bimbingan dan support sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Teruntuk kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA yang telah memberikan kesempatan kepada saya menimba Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia yang membanggakan ini.
2. Dewan Pembimbing Yth, Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H dan Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberilan masukan dan saran yang konstruktif selama dalam proses penulisan sripsi ini yang dijadikan penulis sebagai acuan dan fondasi penting dalam penulisan hingga selesainya skripsi ini.
3. Dewan Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Istri tercinta dr. Tina Nurialam Manurung dan anak-anak saya yang saya banggakan, dr. Beatrice Lorencia Asima Simbolon, Letda. Inf. David Torkis Simbolon, Marcellino Triluna Simbolon dan Samuel Anugerah Simbolon yang sangat peduli dalam memberikan support dan dorongan yang kuat sehingga penulis selalu antusias dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dekan, Kaprodi dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang menambah khasanah penulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dukungan yang sangat baik dalam kelancaran proses akademik selama dalam perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Rekan-rekan sesama mahasiswa fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia kelas karyawan angkatan 22 yang banyak memberikan dukungan dan semangat penulis untuk lebih berpacu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu langsung atau tdak langsung yang juga ikut berkontribusi dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan bmbingan yang Bapak/Ibu berikan Tuhan balaskan melalui berkat dan anugerah yang berlipat dalam kehidupan Bapak/Ibu di kemudian hari.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekecil apapun dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hokum.

Jakarta. 31 Januari 2025

Luhut Simbolon

NIM 2240057026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL i
VISI DAN MISI ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
1. Tujuan penelitian 7
2. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 8
1. Kerangka Teori 8
2. Kerangka Konsep. 9
F. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Jenis Data dan Bahan hukum 11
3. Teknik Pengumpulan Data. 13
4. Teknik Pengolahan Data 14
5. Analisa Data 14
6. Sistematika Penulisan. 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Tinjauan Umum kerangka Tiori 16
1. Teori Kepastian Hukum 16

2. Asas Kepastian Hukum 22
3. Teori Penegakan Hukum 23
4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 26
5. Fungsi Penegakan Hukum 28
B. Tinjauan Umum Kerangka Konsep 31
1. Kontradiksi 31
2. Kewenangan 35
3. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .. 41
4. Tindak Pidana Militer 42
5. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) 43
6. Peradilan Militer 45
BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I 46
A. Penerapan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 46
B. Penerapan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 50
C. Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penyidik Dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 69 Terhadap Pasal 57 Oditur Militer Sebagai Penuntut Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer..... 52
BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II 57
A. Gambaran Umum Tentang Oditurat Militer. 57
B. Proses Penuntutan Yang Dilakukan oleh Oditurat Militer dan Oditurat Militer Tinggi. 58
C. Proses Penuntutan Yang Dilakukan oleh Oditur Jenderal 67
D. Proses Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Oditur Militer Pertempuran.. 69
BAB V PENUTUP 72
A. KESIMPULAN 72
B. SARAN 72
DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

1. Nama : Luhut Simbolon
2. NIM : 2240057026
3. Bagian : Hukum
4. Judul : Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
5. Kata Kunci : Kontradiksi, Kewenangan, Oditur Militer, Peradilan Militer
6. Halaman : i-ix 85 halaman + Daftar Pustaka
7. Ringkasan Isi :

Esensi suatu penegakan dan keadilan hukum itu adalah terletak pada bagaimana penerapannya dalam praktek di lapangan khususnya dalam pemisahan pembagian tugas dan tanggung jawab dari para penegak hukum dalam suatu peradilan tidak terkecuali dalam sistim peradilan militer. Apabila terdapat fungsi rangkap dalam suatu peradilan maka akan sulit untuk mendapatkan independesi dan keprofesionalan dari aparat hukum tersebut bahkan akan timbul kontradiksi dalam menerapkan kewenangan mana yang lebih dominan dilaksanakan dari kewenangan yang lainnya. Untuk menjawab permasalahan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Oditur Militer sesuai Pasal 64,65 dan pasal 69 sebagai penyidik dihadapkan dengan Pasal 57 dimana juga Oditur Militer sebagai penuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus yang dikaji dan dianalisa melalui kajian kepustakaan. Sementara data yang digunakan terdiri dari data primer berupa Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan tentang TNI dan hukum peradilan militer serta hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan data sekunder melalui referensi buku-buku yang relevan dengan data primer serta data tertier dilakukan melalui penggunaan kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk terciptanya penegakan dan keadilan hukum bagi masyarakat dalam suatu sistim peradilan tidak terkecuali juga dalam sistim peradilan militer agar

dilakukan pemisahan yang tegas antara tugas aparat penegak hukum dalam hal sebagai penyidik dan penuntut sehingga diperoleh profesionalisme dan kemandirian yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki dari para penegak hukum itu sendiri. Maka tugas dan kewenangan oditur militer sebagai penyidik sekaligus juga sebagai penuntut yang ada dalam pasal 64,65 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu untuk ditinjau ulang atau dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi kontradiksi kewenangan bagi oditur militer dalam suatu sistim peradilan militer.

8. Daftar Acuan : 55 buku + 8 peraturan perundang-undangan + 1 jurnal + 1 kamus + 1 media

9. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi , S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H

ABSTRACT

1. *Name* : Luhut Simbolon

2. *NIM* : 2240057026

3. *Specificity Program* : *Law*

4. *Title* : *Contradiction of Military Auditor's Authority as Investigators of Criminal Acts Committed by Indonesian Soldiers According to Law of The Republic Indonesia Number 31 of 1997 on Military Justice*

5. *Keywords* : *Contradiction, Authority, Military Auditors, Military Justice*

6. *Pages* : *i-ix 85 pages + Bibliography*

7. *Content Summary* :

The essence of law enforcement and justice lies in how it is applied in practice in the field, especially in the separation of the division of tasks and responsibilities of law enforcers in a court, including in the military justice system. If there is a dual function in a court, it will be difficult to obtain independence and professionalism from the legal apparatus, and there will even be contradictions in implementing which authority is more dominant than the other. To answer the above problems, the formulation of the problem raised in this thesis is how the authority of the Military Auditor according to Articles 64, 65 and 69 as investigators is faced with Article 57 where the Military Auditor is also a prosecutor based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and how the prosecution process is carried out by the Military Auditor against Indonesian National Army Soldiers who commit crimes.

This study uses a normative legal method with a case approach that is studied and analyzed through a literature review. Meanwhile, the data used consists of primary data in the form of Laws and Regulations on the TNI and military justice law and other laws and regulations, while secondary data through references to books relevant to primary data and tertiary data is carried out through the use of legal dictionaries and other relevant dictionaries.

From the results of this study, it can be concluded that in order to create legal enforcement and justice for the community in a judicial system, including in the military justice system, a strict separation must be made between the duties of law enforcement officers in terms of investigators and prosecutors so that clear professionalism and

independence are obtained in carrying out the duties and authorities of the law enforcers themselves. Therefore, the duties and authorities of the military prosecutor as an investigator as well as a prosecutor in articles 64, 65 and 69 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice need to be reviewed or changed so that there is no contradiction in authority for the military prosecutor in a military justice system.

8.	*Reference List*	*: 55 books + 8 legislations + 1 journal + 1 dictionary + 1 media*
9.	*Supervisor* I	: Dr. Hendri Jayadi , S.H., M.H
	Supervisor II	: Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA -JAKARTA 1953- MELAYANI, BUKAN DILAYANI